ISSN 2252-9144

ETNOREFLIKA

JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA
JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALUOLEO
Volume 2, Nomor 2, Juni 2013



Kajian Ritual Melaut dan Perubahannya pada Orang Bajo di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna

Fenomena Eksploitasi Agraris Oleh Kaum Kapital Domestik (Sebuah Studi Kasus di Wilayah Perkebunan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara)

Konstruksi Budaya Suku Toraja *"Rambu Solo"* di Tengah Masyarakat Suku Tolaki Mekongga di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka

Bagi Hasil Tanah Pertanian yang Dibebani Hak Gadai dalam Budaya Pertanian Masyarakat

Eksistensi *Passompe'* di Daerah Perantauan (Studi tentang Misi Budaya Perantau Etnik Bugis di Kota Kendari)

Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kota Kendari

Dinamika *Mepeduluhi* Masyarakat Wawonii di Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe

Pekerja Seks Komersial (Studi tentang Hubungan Germo dan PSK di Pagar Seng, Lorong Alam Jaya, Jalan R. Soeprapto Mandonga Kendari)

Implementasi Kebijakan dan Tingkat Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Bende Kota Kendari

ETNOREFLIKA | Volume 2 | Nomor 2 | Halaman 192-284 | Kendari Juni 2013 | ISSN 2252-9144

ETNOREFLIKA JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Vol: 2

Jurnal ETNOREFLIKA didedikasikan sebagai sebuah terbitan ilmiah berkala yang diharapkan dapat menjadi ajang pertukaran gagasan dan pemikiran dalam bidang Antropologi, khususnya dan ilmu - ilmu sosial pada umumnya. ETNOREFLIKA hadir dengan misi membangun tradisi dan iklim akademis untuk kemajuan peradaban dan harkat kemanusiaan.

Selain itu, Jurnal ETNOREFLIKA yang secara sengaja mengambil kata generik 'ethnos' yang bertujuan mengemban misi mempromosikan dan mengembangkan semangat multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Reflika dimaknai sebagai proses merefleksikan perilaku, ide dan lingkungannya.

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang bersifat teoritik, hasil penelitian berupa etnografi, dan tulisan—tulisan yang memuat gagasan konstruktif untuk menyelesaikan problem sosial budaya dalam arti luas maupun masalah-masalah pembangunan secara umum, serta tinjauan buku-buku teks antropologi dan ilmu sosial lainnya. Isi artikel tidak harus sejalan dengan pendapat redaksi. Tulisan diketik dengan program MS Word spasi rangkap di atas kertas ukuran A4, dan menyerahkan naskah secara eletronik dan cetak kepada redaksi. Panjang artikel maksimal 5000 kata, dengan mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Mohon agar disertakan abstrak maksimal 300 kata, catatan kaki agar dibuat di bagian bawah tulisan dengan urutan nomor. Referensi dibuat menurut abjad nama penulis sesuai dengan contoh tulisan yang ada di edisi ini. Jurnal ETNOREFLIKA terbit tiga kali dalam setahun.

Etnoreflika

JURNAL SOSIAL BUDAYA
VOL. 02-NO.02-JUNI 2013
ISSN: 2252-9144

Penasihat
Dekan FISIP Universitas Haluoleo
Ketua Jurusan Antropologi Universitas Haluoleo

Penanggung Jawab
Kepala Laboratorium Jurusan Antropologi
FISIP Universitas Haluoleo

Pemimpin **Redaksi**
Laxmi, S.Sos., M.A

Wakil Pemimpin Redaksi
Akhmad Marhadi, S.Sos., M.Si

Sekretaris Redaksi
Raemon, S.Sos., M.A.

Dewan Redaksi
Dra. Hj. Wa Ode Sitti Hafsah, M.Si
Dra. Wa ode Winesty Sofyani, M.Hum.
Drs. Syamsumarlin, M.Si
Dra. Hasniah, M.Si
Hartini, S.Sos., M.Si
La. Janu, S.Sos., M.A.
Ashmarita, S.Sos., M.Si
La Ode Aris, S.Sos., M.A.
Rahmawati, S.Pd., M.A.
Wa Ode Nur Iman, S.Pd., M.Pd.

Penelaah Ahli
Prof. Dr. H. Nasruddin Suyuti, M.Si (Unhalu),
Prof. Dr. H. Pawenari Hijang, M.A (Unhas),
Prof. Dr. H. Sulaeman Mamar, M.A. (Untad)
Dr. Lono Lastoro Simatupang, M.A (UGM),
Dr. Nicolas Waroow, M.A (UGM),
Dr. Munsi Lampe, M.A. (Unhas).

Tata Usaha
Hadrianti
Ade Rahman
Reni

Sirkulasi
Rahman, S.Sos., M.Si.
Alham Haidir

Keuangan
Risnawati

Etnoreflika Online
Rahmat Sewa Soraya, S.Sos., M.Si.
Ade Makmur
Edo Sanjani

Penerbit
Laboratorium Jurusan Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Haluoleo

Alamat Redaksi
Jl. H.E.Agus Salim Mokodompit, FISIP
Ruangan Laboratorium Antropologi.

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat-Nya segala yang kita lakukan dengan kerja keras dapat terlaksana dengan baik. Jurnal Etnoreflika Volume 2 Nomor 2 bulan Juni tahun 2013 telah terbit dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan tersebut merupakan hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai disiplin ilmu, yakni sosial dan budaya yang berasal dari jurusan yang berbeda-beda. Jurnal Etnoreflika Volume 2 Nomor 2, Juni 2013, memuat tulisan sebagai berikut:

- Kajian Ritual Melaut dan Perubahannya pada Orang Bajo di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna.
- Fenomena Eksploitasi Agraris oleh Kaum Kapital Domestik (Sebuah Studi Kasus di Wilayah Perkebunan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Konstruksi Budaya Suku Toraja "*Rambu Solo*" di Tengah Masyarakat Suku Tolaki Mekongga di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
- Bagi Hasil Tanah Pertanian yang Dibebani Hak Gadai dalam Budaya Pertanian Masyarakat.
- Eksistensi *Passompe*' di Daerah Perantauan (Studi tentang Misi Budaya Perantau Etnik Bugis di Kota Kendari).
- Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kota Kendari.
- Dinamika *Mepeduluhi* Masyarakat Wawonii di Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe.
- Pekerja Seks Komersial (Studi tentang Hubungan Germo dan PSK di Pagar Seng, Lorong Alam Jaya, Jalan R. Soeprapto Mandonga Kendari)
- Implementasi Kebijakan dan Tingkat Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Bende Kota Kendari.

Semoga sajian dalam jurnal ini, dapat memberikan kontribusi, informasi maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.

Salam Redaksi

Volume 2, Nomor 2,
Juni 2013

ETNOREFLIKA

DAFTAR ISI

Hj. Wakuasa La Ode Aris	192-202	Kajian Ritual Melaut dan Perubahannya pada Orang Bajo di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna
Peribadi	203-211	Fenomena Eksploitasi Agraris oleh Kaum Kapital Domestik (Sebuah Studi Kasus di Wilayah Perkebunan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
Marsia Sumule Genggong Hj. Erni Qomariah	212-222	Konstruksi Budaya Suku Toraja "*Rambu Solo*" di Tengah Masyarakat Suku Tolaki Mekongga di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka
Heryanti	223-230	Bagi Hasil Tanah Pertanian yang Dibebani Hak Gadai dalam Budaya Pertanian Masyarakat
Hj. Suharty Roslan	231-239	Eksistensi *Passompe*' di Daerah Perantauan (Studi tentang Misi Budaya Perantau Etnik Bugis di Kota Kendari)
Jabalnur	240-245	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kota Kendari
Syamsumarlin	246-257	Dinamika *Mepeduluhi* Masyarakat Wawonii di Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe
L.M. Kamaluddin Aksyah Hasniah	258-272	Pekerja Seks Komersial (Studi tentang Hubungan Germo dan PSK di Pagar Seng, Lorong Alam Jaya, Jalan R. Soeprapto Mandonga Kendari)
Muhammad Yusuf	273-284	Implementasi Kebijakan dan Tingkat Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Bende Kota Kendari

ETNOREFLIKA

VOLUME 2 No. 2. Juni 2013. Halaman 240-245

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI KOTA KENDARI[1]

Jabalnur[2]

ABSTRAK

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung di lapangan, tapi dengan melakukan studi kepustakaan hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Data-data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan bahwa peran serta masyarakat dalam desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir bahwa kepada masyarakat diberi wewenang, tanggung jawab, dan kesempatan untuk mengelola sumber dayanya dan menyangkut pula pemberian tanggung jawab kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka. Pelibatan masyarakat disesuaikan dengan strategi pengelolaan pada masing-masing wilayah yang akan bervariasi sesuai dengan situasi setempat. Dalam pelaksanaan peran serta masyarakat tersebut, hal yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh suatu masyarakat yang merupakan kearifan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Key word: masyarakat, pengelolaan, wilayah pesisir

ABSTRACT

The objective of this writing is to know thepublic participation in decentralizing of coastal zone management. This type of research is normative research by using secondary data that data is not obtained directly rom the field, but by studying the literature of research results and other sources that relevantto theinvestigated issues. The data was collected then analyzed by descriptive qualitative. The conclusion is that public participation in decentralizing of coastal zone management that the public was given the authority, responsibility, and opportunity to manage its resources and also involved giving responsibility to the community so that they could make decisions that ultimately determined and affected their welfare. Community involvement in the management strategies tailored to each area would vary according to local circumstances. In implementation of public participation, the things to be noted are the values and norms that embraced by a society which is the local wisdom in managing natural resources and environment.

Key word: *public, management, coastal zone*

[1]Hasil Penelitian

[2]Staf Pengajar Pada Fakultas Hukum, Universitas Haluoleo, Kendari

A. PENDAHULUAN

Mengatur pemanfaatan wilayah pesisir yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui maka telah banyak produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir terutama dalam hal eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumber daya alam terutama kelautan yang ditandai dengan tiga ciri yaitu (1) sentralistik, ditandai dengan terpusatnya kewenangan produksi dan implementasi hukum pada pemerintah pusat dan kemudian pelaksanaannya berupa tugas pembantuan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat; (2) berbasis pada doktrin milik bersama (*common property*), yang antara lain belum memberikan kemungkinan pemberian hak penangkapan ikan (*fishing property*) atau hak budidaya laut (*marine culture right*) kepada masyarakat nelayan; (3) anti pluralism hukum, indikasinya adalah pengingkaran terhadap hokum adat (*folk law*), padahal hukum adat memiliki sejarah yang sangat kokoh dalam kultur masyarakat Indonesia juga pada kenyataannya dibeberapa daerah masih sangat dipertahankan.

Kehadiran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan adanya perubahan pola kebijakan dari sentralisasi ke kebijakan desentralisasi yang lebih banyak memberkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Pengelolaan sektor kelautan selama ini yang dilakukan dengan sistem sentralisasi ternyata menyebabkan persoalan kelautan menjadi terbengkalai dimana banyak terjadi kehancuran biota laut dan sumber daya alam kelautan, konsep pengelolaan wilayah pesisir yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup. Hal ini karena daerah tidak diberi kewenangan pengelolaan wilayah laut/pesisir.

Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten/kota sampai kepada pengaturan dan pengawasan penataan ruang laut serta pengendalian pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Konsep pengelolaan lingkungan hidup bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup wilayah pesisir maka implementasi otonomi daerah membawa implikasi terhadap aktivitas pemanfaatan sumber daya pesisir seperti perikanan. Daerah dituntut bertanggung jawab atas kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan di daerahnya itu, serta semakin terbuka peluang bagi masyarakat lokal (nelayan) untuk terlibat dalam proses pengelolaan sumberdaya.

Wilayah pesisir memiliki kompleksitas aktivitas ekonomi dan ekologi terjadi di wilayah ini. Kompleksitas aktivitas ekonomi seperti perikanan, pariwisata, pemukiman, perhubungan, dan sebagainya memberikan tekanan yang cukup besar terhadap keberlanjutan ekologi wilayah pesisir seperti ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Tekanan yang demikian besar tersebut jika tidak dikelola secara baik akan menurunkan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang terdapat di wilayah pesisir.

Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari memiliki kawasan pesisir yang sangat rentan mengalami kerusakan bila tidak dikelola secara baik dalam pemanfaatannya seperti pada kawasan pantai dan teluk Kendari. Pemanfaatan dengan pemberian izin oleh pemerintah untuk kegiatan perekonomian justru kadang berdampak negatif pada kelestarian kawasan tersebut.

Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut perlu dilakukan secara hati-hati agar tujuan dari upaya dapat dicapai. Masyarakat sebagai pihak yang akan paling merasakan dampak dari kerusakan lingkungan pesisir, apalagi bagi masyarakat yang menjadikan laut atau wilayah pesisir sebagai sumber mata pencaharian sehari-hari, maka sangat dibutuhkan peran sertanya untuk ikut terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir sehingga menimbulkan rasa keterikatan untuk menjaga wilayah tersebut karena ada keterlibatan langsung.

Berdasarkan pendahuluan tersebut, maka tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu tipe penelitian yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan (otonomi) pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung di lapangan dengan melakukan studi kepustakaan hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

Data sekunder yaitu dengan meneliti dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumentasi buku serta literatur-literatur yang relevan dengan rumusan masalah penulisan karya ilmiah ini Peneliti mencari literature yang relevan dengan topik pembahasan kemudian terhadap beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 sehingga akan diperoleh data sekunder yang bersifat normatif.

Data-data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menelaah dan meneliti data-data yang ada yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk uraian guna menjawab rumusan masalah.

C. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI KOTA KENDARI

Sumber daya kawasan pesisir meliputi sumber daya alam yang dapat diperbaharui meliputi berbagai biota laut yang tumbuh dan hidup disekitar kawasan pesisir termasuk terumbu karang. Sedangkan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui meliputi minyak, gas, mineral, batu-batuan, pasir dan sebagainya.

Peranan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam hal ini menjadi bagian terpenting yang tidak terpisahkan dalam upaya mengelola lingkungan pesisir dan laut. Dewasa ini, pengelolaan lingkungan secara terpadu disinyallir terbukti memberikan peluang pengelolaan yang cukup efektif dalam rangka menyeimbangkan antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan ekonomi. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan akan adanya bentuk-bentuk pengelolaan lain yang lebih aplikatif (*applicable*) dan adaptif (*acceptable*). Salah satu bentuk pengelolaan yang cukup berpeluang memberikan jaminan efektifitas dalam pengimplementasiannya adalah pengelolaan berbasis masyarakat (*community based management*)[3].

UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut memberikan tonggak hukum terhadap kewenangan daerah untuk mengelola laut. Undang-undang ini dengan tegas menyatakan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengurus laut. Kewenangan daerah atas laut mencakup pengaturan administrasi, tata ruang dan penegakan hukum

[3]http://komitmenku.wordpress.com/2008/05/13/pelibatan-masyarakat-dalam-penanggulangan-kerusakan-pesisir-dan-laut/, tanggal akses 4 Mei 2013.

berkenaan dengan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut. Selain itu, daerah juga berwenang memberikan bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan Negara. Kewenangan daerah atas laut dibagi dua, yakni wilayah laut propinsi dan wilayah laut kabupaten/kota. Kewenangan propinsi atas laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan. Sedangkan wilayah laut kabupaten/kota adalah sepertiga dari batas laut daerah propinsi.

Konsep "pengelolaan wilayah pesisir" berbeda dengan konsep "pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir" yang mengelola semua orang dan segala sesuatu yang ada di wilayah pesisir. Contoh dari pengelolaan yang berbeda dengan pengelolaan wilayah pesisir adalah; pengelolaan perikanan, pengelolaan hutan pantai, pendidikan dan kesehatan dimana contoh-contoh tersebut tidak melihat wilayah pesisir sebagai target. Paling utama dari konsep pengelolaan wilayah pesisir adalah fokus pada karakteristik wilayah dari pesisir itu sendiri.

Inti dari konsep pengelolaan wilayah pesisir adalah kombinasi dari pembangunan *adaptif*, terintegrasi, lingkungan, ekonomi dan sistem sosial. Strategi dan kebijakan yang diambil didasarkan pada karakteristik pantai, sumberdaya, dan kebutuhan pemanfaatannya. Proses perencanaan wilayah pesisir, dimungkinkan pengambilan keputusan akan diarahkan pada pemeliharaan untuk generasi yang akan datang (pembangunan berkelanjutan).

Idealnya, dalam sebuah proses pengelolaan kawasan pesisir yang meliputi perencanaan, implementasi dan evaluasi, harus melibatkan minimal tiga unsur ,yaitu ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat. Proses alam lingkungan pesisir dan pe-rubahan ekologi hanya dapat dipahami oleh ilmuwan dan kemudian pemahaman tersebut menjadi basis pertimbangan bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan yang menempatkan masyarakat pesisir sebagai pelaku dengan tujuan meningkatkan keadaan sosial ekonomi kawasan.

Peran pemerintah dan masyarakat di daerah merupakan faktor penting dalam rangka merumuskan program pengelolaan yang tepat dan bijaksana serta berkelanjutan. Pemerintah adalah regulator yang berfungsi untuk menjalankan aturan-aturan yang berlaku dengan kepatuhan semua *stakeholders*. Pemerintah harus menjalankan fungsinya secara transparan, demokratis dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program-program pembangunan pesisir yang secara langsung menyentuh dan memberdayakan lapisan masyarakat nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjamin adanya pemerataan sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Pengelolaan Pesisir sangat penting di daerah sebagai pemenuhan kebutuhan daerah yang sangat spesifik dan cocok untuk dikembangan sesuai kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.

Proses pengelolaan lingkungan ada sebaiknya dilakukan dengan lebih memandang situasi dan kondisi lokal agar pendekatan pengelolaannya dapat disesuaikan dengan kondisi lokal daerah yang akan dikelola. Pandangan ini tampaknya relevan untuk dilaksanakan di Indonesia dengan cara memperhatikan kondisi masyarakat dan kebudayaan serta unsur-unsur fisik masing-masing wilayah yang mungkin memiliki perbedaan di samping kesamaan.

Strategi pengelolaan pada masing-masing wilayah akan bervariasi sesuai dengan situasi setempat. Nilai-nilai dan norma-norma yang perlu diperhatikan dan dianut oleh suatu masyarakat merupakan kearifan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

Selama ini telah banyak terjadi kerusakan pada lingkungan diseputar wilayah

pesisir. Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut perlu dilakukan secara hati-hati agar tujuan dari upaya dapat dicapai. Mengingat bahwa subjek dan objek penanggulangan ini terkait erat dengan keberadaan masyarakat pesisir, dimana mereka juga mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi terhadap ketersediaan sumberdaya di sekitar, seperti ikan, udang, kepiting, kayu mangrove, dan sebagainya, maka penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut yang berbasis masyarakat menjadi pilihan yang bijaksana untuk diimplementasikan.

Tujuan penanggulangan kerusakan pesisir dan laut berbasis masyarakat dalam hal ini adalah memberdayakan masyarakat agar dapat berperanserta secara aktif dan terlibat langsung dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan lokal untuk menjamin dan menjaga kelestarian pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan, sehingga diharapkan pula dapat menjamin adanya pembangunan yang berkesinambungan di wilayah bersangkutan.

Secara khusus tujuan penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat dalam hal ini dilakukan untuk :

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menanggulangi kerusakan lingkungan;
b. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan rencana penanggulangan kerusakan lingkungan secara terpadu yang sudah disetujui bersama;
c. Membantu masyarakat setempat memilih dan mengembangkan aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan;
d. Memberikan pelatihan mengenai sis-tem pelaksanaan dan pengawasan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat.

Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di suatu wilayah berdasarkan karakteristik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah tersebut. Komunitas mempunyai hak untuk dilibatkan atau bahkan mempunyai kewenangan secara langsung untuk membuat sebuah perencanaan pengelolaan wilayahnya disesuaikan dengan kapasitas dan daya dukung wilayah terhadap ragam aktivitas masyarakat disekitarnya.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir biasa disebut pengelolaan berbasis masyarakat yaitu sistem pengelolaan sumberdaya terpadu yang perumusan dan perencanaannya dilakukan dengan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) berdasarkan aspirasi masyarakat dan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan berbasis masyarakat atau melibatkan peran serta masyarakat merupakan suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdayanya dan menyangkut pula pemberian tanggung jawab kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka.

Pengelolaan yang berbasis masyarakat merupakan suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan disuatu tempat dimana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya. Pengelolaan di sini meliputi berbagai dimensi seperti perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

Peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya dan lingkungan seoptimal mungkin harus seimbang, terkoordinasi dan tersinkronisasi. Hal ini penting dilakukan mengingat pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan

pelayanan terhadap masyarakat, termasuk mendukung pengelolaan sumberdaya dan lingkungan demi sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat mempunyai tanggung jawab dan turut berperanserta untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan.

Desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir dengan otonomi daerah merupakan momentum untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah terabaikan serta memberikan posisi utama kepada masyarakay untuk terlibat dalam pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan menikmati hasil-hasil pembangunan). Sedangkan pemerintah dan aparatnya serta pihak swasta termasuk organisasi kemasyarakatan sebagai pendukung atau fasilitator. Pengelolaan sumberdaya yang berbasis masyarakat sangat efektif. Efektifitas ini tercipta karena masyarakat merasa bertanggung jawab terhadap kondisi sumberdaya di sekitarnya.

D. PENUTUP

Peran serta masyarakat dalam desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir bahwa kepada masyarakat diberi wewenang, tanggung jawab dan kesempatan untuk mengelola sumberdayanya dan menyangkut pula pemberian tanggung jawab kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka. Pelibatan masyarakat disesuaikan dengan strategi pengelolaan pada masing-masing wilayah yang akan bervariasi sesuai dengan situasi setempat. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilai dan norma-norma yang dianut yang merupakan kearifan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

Agar pengelolaan wilayah pesisir selama ini cenderung bersifat sektoral lebih memperhatikan kondisi daya dukung lingkungan serta perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi masyarakat pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Irawan Soejito, 1984, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta:Bina Aksara.

Mukhlis, 1989, *Persepsi Sejarah Kawasan Pantai*, P3MP Universitas Hasanuddin. Jakarta: SA BROTHERS

Rokhimin Dahuri, dkk, 2001, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Sugiarto, dkk, 1993, *Pengembangan Desa Pantai Miskin, Lokakarya Pemantapan Strategi Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir Da-lam Pembangunan Jangka Pan-jang Tahap Kedua*. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta.

Wahyudin, Yudi. 2008. Pelibatan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kerusakan Pesisir dan Laut. Online (http://komitmenku.-wordpress.com-/2008/05/13/pelibatan-masyarakat-dalam-penanggulangan-kerusakan-pesisir-dan-laut/).Diakses Pada Tanggal 4 Mei 2013.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH

Naskah yang dikirim ke Redaksi Jurnal Etnoreflika harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Naskah belum pernah dipublikasikan oleh media cetak lain.
2. Naskah berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori tentang fenomena sosial dan budaya.
3. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pada kertas A4 dengan huruf *Times New Roman* 12 spasi 1,5. Margin atas 4 cm,kanan 3 cm, kiri 3 cm dan bawah 3 cm . Jumlah halaman 10-20 halaman di luar daftar pustaka dan tabel.
4. Sistematika penulisan naskah, yaitu: (a) judul naskah; (b) nama penulis (tanpa gelar akademik); (c) asal institusi dan alamat, telepon, fax, atau email (d) abstrak (maksimum 100-150 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia; (e) kata kunci (2-5 kata); (f) pendahuluan (tanpa judul subbab) yang memuat latar belakang, masalah, tujuan penulisan, kerangka teori; (g) metode penelitian (jika naskah merupakan hasil penelitian); (h) pembahasan yang disajikan dalam subbab; (i) penutup; (j) daftar pustaka.
5. Daftar Pustaka dan sumber lainnya disusun secara alfabetis dan kronologis dengan mengikuti tata cara sebagai berikut.

   Spradley, James. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana. (rujukan buku)

   Hill, Erica. 1998. Gender-Informed Archaeology: The Priority of Definition, The Use of Analogy, and The Multivariate Approach" dalam *Journal of Archaeological Method and Theory,* Vol. 5, No. 1. (rujukan jurnal ilmiah)

   Hugo, Graeme J. *et al*. 1987. *The Demographic Dimension In Indonesian Development.* New York: Oxford University Press.(Rujukan buku dengan 4 pengarang atau lebih)

   Landa, Apriani. 17 Juli 2008. "Tekad Siswa Bersih Narkoba" dalam *Tribun Timur*: hlm 14. (rujukan surat kabar/majalah).

   Parsudi, Suparlan. 2008. *Struktur Sosial, Agama, dan Upacara. Geertz, Hertz, Cunningham, Turner, dan Levi-Strauss.* Online. (http://prasetijo.wordpress.com/2008/10/09/struktur-sosial-agama-dan-upacara-geertz-hertz-cunningham-turner-dan-levi-strauss). Diakses pada tanggal 21 Januari 2009. (rujukan internet)
6. Naskah dikirim dalam bentuk print out disertai file dalam compact disk (CD) atau flash disk dengan menggunakan pengolah data *Microsoft Word* ke alamat redaksi.
7. Redaksi membuka kesempatan bagi siapa saja (peneliti, dosen, guru, dan tenaga profesional lain) untuk mengirimkan naskah.
8. Kepastian pemuatan/penolakan naskah akan diinformasikan secara tertutup melalui pos atau e-mail. Naskah yang dimuat tidak dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.
9. Redaksi mempunyai kewenangan mengatur waktu penerbitan dan format penulisan sesuai petunjuk penulisan naskah Jurnal Etnoreflika.
10. Biodata penulis ditulis dalam lembar tersendiri.

Alamat Redaksi
Laboratorium Jurusan Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Haluoleo
Kampus Bumi Tri Dharma Anduonohu Kendari 393231
Telepon/Fax. (0401) 393381 e-mail: jurnaletnoreflikaunhalu@gmail.com





JURNAL ETNOREFLIKA
JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALUOLEO
Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 393231
Telepon/Fax. (0401) 393381 e-mail: jurnaletnoreflikaunhalu@gmail.com